

## ***Closing Remark***

### **Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

#### **Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga**

Yang terhormat Bapak Deputy bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas

Yang terhormat *Minister Counsellor Departement of Foreign Affair and Trade* Kedutaan Besar Australia beserta jajarannya

Yang terhormat Ibu Shinta Kamdani *President of Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE)*

Yang terhormat Bapak/Ibu Narasumber

Para undangan dan hadirin yang berbahagia,

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.**

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada Program MAMPU yang bekerjasama dengan Sekretariat SDGs atas terselenggaranya Sesi 2 *Parallel Event B* pada *SDGs Annual Conference* dengan tema “***Women's Empowerment***”. Pertemuan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk berdiskusi tentang capaian, praktek-praktek baik yang sudah berjalan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, peran apa yang dijalankan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha, serta bagaimana menyelaraskan upaya-upaya tersebut dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SGDs) di Indonesia, khususnya terkait Tujuan 5: Kesenjangan Gender.

#### **Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,**

Setelah mengikut rangkaian acara diskusi dari siang hingga sore ini, banyak hal-hal bermanfaat yang dapat diambil untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dalam hal ini saya akan meng-*highlight* beberapa poin yang dapat digunakan untuk memperkuat strategi pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan berbagai pihak selama ini.

1. Poin pertama adalah pentingnya peningkatan kapasitas perempuan untuk memastikan mereka mampu berperan dalam proses pembangunan. Inisiasi yang cukup baik telah dilakukan oleh Program MAMPU dengan beberapa Mitranya

melalui Sekolah Perempuan. Dengan adanya sekolah perempuan, perempuan tidak hanya dibekali dengan kemampuan literasi (baca dan tulis), namun juga dibentuk untuk bisa berpikir kritis dan berani menyuarakan pendapat mereka. Hal ini sangat penting untuk memastikan perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, menerima manfaat, serta berperan dalam mengontrol proses dan hasil pembangunan.

2. Selanjutnya, peningkatan kapasitas perempuan perlu juga ditunjang dengan pemberian ruang bagi mereka untuk berbicara, didengar dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Salah satu upaya cukup progresif adalah penggunaan metode reses partisipatif bagi anggota parlemen dalam memanfaatkan masa resesnya. Metode ini bersifat konsultatif partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya. Dengan demikian, diharapkan anggota parlemen, pemerintah, dan konstituen memiliki referensi yang valid berdasarkan kebutuhan nyata dalam menyusun dan memonitor perencanaan dan penganggaran pembangunan di wilayah kerjanya. Contoh lain pemberian ruang juga dapat dilihat dari adanya akses bagi perempuan untuk masuk kedalam pasar kerja. Peningkatan kapasitas perempuan dan pemanfaatan potensi yang ada pada diri perempuan menjadi aspek penting dalam perkembangan sektor ekonomi.
3. Poin selanjutnya, penguatan di tingkat *grassroot* belum cukup tanpa didukung oleh kebijakan pemerintah. Dalam hal ini penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi poin penting untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender di setiap lini pembangunan. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat kerangka regulasi melalui penyusunan Peraturan Presiden Stranas Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), serta penguatan komitmen dan koordinasi antar lintas *stakeholder*.
4. Selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa program dan layanan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus responsif gender. Salah satu inovasi yang telah dilakukan di tingkat *grassroot* adalah KLIK PEKKA. *Tools* ini membantu telah membantu masyarakat, khususnya yang berada pada kelompok rentan, dalam mengakses dokumen legal dan jaminan kesehatan nasional.
5. Tidak kalah pentingnya, Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan perlakuan salah juga perlu dijadikan prioritas. Perempuan tidak akan mampu untuk bersuara, ketika mereka berada pada posisi rentan dan tidak terlindungi. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mereka terhadap aspek legalitas, penegakan hukum, serta penguatan layanan korban kekerasan terhadap perempuan perlu dioptimalkan.
6. Berbagai inovasi dan praktik baik telah dilahirkan di level masyarakat, sebagai upaya dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Tidak sedikit pula dari praktik tersebut yang telah di *Scale Up* ke level yang lebih tinggi. Sebagai contohnya adalah: Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang telah di replikasi menjadi program nasional dengan nama “Desa Migran Produktif

(Desmigratif)". Selain itu, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKtP) telah dijadikan Prioritas Nasional untuk tahun 2019.

7. Dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, data dan informasi sangat diperlukan. Data terpilah menjadi kunci penting dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai pusat kajian dan akademisi menjadi penunjang utama untuk menerapkan penyusunan kebijakan berbasis bukti. Dengan adanya data yang akurat, diharapkan program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada para penyelenggara acara, para narasumber, serta hadirin semua atas terlaksananya acara ini.

Kita menyadari bahwa dibalik semua capaian dan praktik baik yang telah berjalan selama ini, masih ada pekerjaan rumah yang besar bagi kita terutama dalam meningkatkan komitmen, sinergi, dan kerjasama yang baik dari semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan dengan erat untuk saling mendukung demi mewujudkan prinsip "no one left behind", termasuk bagi perempuan, dalam seluruh proses pembangunan.

Demikian saya sampaikan *closing remarks* ini. Dengan mengucapkan **Hamdallah /puji syukur kepada Tuhan YME**, Diskusi Sesi 2 Paralel Event B dengan tema Women's Empowerment ini resmi saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 17 Desember 2018

**Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga**

**Woro Srihastuti Sulistyaningrum**